



Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah Dan Belanja Modal Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Metro

Umi Hadijah¹, Yulita Zanaria², Gustin Padwa Sari^{3*}

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

E-mail: umihadijah03@gmail.com¹⁾
yulitzanaria13@gmail.com²⁾
gustinpadasari88@gmail.com^{3*)}

ARTICLE INFO

Article history:
Received 27 Desember
2024
Received in Revised 07
Maret 2025
Accepted 30 Mei 2025

Keyword's :
Original Regional
Income, Regional
Wealth, Capital
Expenditure And
Financial
Independence

ABSTRACT

This research aims to analyze local original income, regional wealth and capital expenditure in increasing the financial independence of metro city governments. This type of research uses qualitative research with a descriptive approach. The researcher is the main instrument of this research, assisted by data from the 2020-2023 metro city regional government financial reports. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that local original income, regional wealth and capital expenditure have not been able to increase the financial independence of metro city governments.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan asli daerah, kekayaan daerah dan belanja modal dalam meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah kota metro. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti merupakan instrumen utama penelitian ini dibantu dengan data laporan keuangan pemerintah daerah kota metro tahun 2020-2023. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, kekayaan daerah dan belanja modal belum dapat meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah kota metro.

Expensive : Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Website : <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/expensive>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: gustinpadasari88@gmail.com

Peer review under responsibility of Expensive: Journal of Accounting and Finance. 2829-4807.

PENDAHULUAN

Menurut (Lampung Post, 2021) Realisasi pendapatan APBD Metro tahun anggaran 2020 mencapai Rp917,9 miliar atau 100,95% dari target sebesar Rp909,3 miliar. Sementara belanja sebesar Rp946,9 miliar sehingga defisit Rp28,9 miliar. Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp221,6 miliar atau 111,14% dari target sebesar Rp199,4 miliar. Pendapatan transfer Rp677,8 miliar dan pendapatan wajib lainnya Rp28,9 miliar.

Menurut (Mabrur Aziz, 2022) Rapat paripurna tersebut dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Konstituen Frokopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Pendamping, Pimpinan OPD dan Camat serta Kepala Desa se-Kota Metro. Sementara itu, rapat virtual juga dihadiri oleh Sekretaris OPD dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah. Anggota Badan Anggaran Wasis Riyadi saat memaparkan laporan Badan Anggaran menyebutkan, pada tahun 2021, pendapatan daerah melebihi 938 miliar dan belanja daerah melebihi 928 miliar. Sebab, pada 2021 surplus anggaran lebih dari 10 miliar. Sementara volume pembiayaan bersih daerah lebih dari 70 miliar, sehingga hingga tahun 2021 sisa dana anggaran lebih dari 80 miliar.

Menurut (Mabrur Aziz, 2022) Pendapatan daerah Kota Metro diproyeksikan tumbuh sebesar 9 miliar pada tahun 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 5,7 miliar dan peningkatan pendapatan transfer sebesar 3,7 miliar. Hal itu diungkapkan Wali Kota Metro Wahdi saat memaparkan usulan perubahan APBD tahun anggaran 2022 di hadapan DPRD daerah, Selasa sore 6 September 2022. Secara spesifik Wahdi mengatakan, peningkatan pendapatan utama daerah tersebut disebabkan oleh kenaikan pajak daerah sebesar 4,1 miliar, kenaikan retribusi daerah sebesar 404 juta, peningkatan pendapatan utama daerah lain yang sah sebesar 1,83 miliar, dan penurunan pendapatan primer daerah sebesar 1,83 miliar. penghasilan. kekayaan 606 juta. Sementara itu, peningkatan pendapatan transfer disebabkan oleh peningkatan pendapatan transfer antar daerah sebesar R3,7 miliar dan penurunan pendapatan transfer nasional sebesar R367,8 juta.

Menurut (Metro, 2023) Fraksi metro di DPRD Kota Metro menyoroti adanya peningkatan pendapatan sebesar Rp68,723 miliar pada rancangan APBD 2024. Pasalnya, peningkatan tersebut belum mencerminkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), karena masih bergantung pada pendapatan pusat dan pendapatan antar daerah. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro yang agendanya adalah sikap umum fraksi-fraksi dalam pemaparan rancangan peraturan daerah APBD Kota Metro Tahun 2024 "Kami informasikan kepada Metro melalui tim APBD Kota Metro." dewan kota (TAPD): "2024. Pendapatan RAPBD meningkat menjadi Rp971,037 miliar

pada tahun 2023, meningkat Rp68,723 miliar atau 7,6 persen dibandingkan tahun 2023. Tahun anggaran Rp902,314 miliar,” kata Juru Bicara Kelompok DPRD Kota Metro Deswani, Rabu (22/11/2023).

Namun, lanjut politikus NasDem itu, peningkatan tersebut belum mencerminkan peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena masih bergantung pada transfer pusat dan antar daerah. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar BPPRD dan perangkat daerah terkait lebih meningkatkan PAD, termasuk optimalisasi dan rasionalisasi pajak, pengelolaan sampah, parkir, dan pajak penghasilan lainnya. Lanjut Deswan, Fraksi DPRD Kota Metro juga menyoroti kenaikan beban usaha sebesar Rp102,859 miliar atau 12,87 persen. Namun pertumbuhan tersebut justru meningkat karena kenaikan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal mengalami penurunan dari Rp108,277 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp79,991 miliar pada tahun 2024,” jelasnya di bagian lain seraya menambahkan, Rombongan DPRD Kota Metro juga meminta Dinas Perumahan dan Permukiman PUTR (Perkim) memperbaiki pelaksanaannya. Dari kegiatan olahraga tahun 2024, sehingga sebagian besar pelatihan harus dimulai pada triwulan I tahun 2024. “Hal ini tidak hanya menjaminantisipasi musim hujan di penghujung tahun, tapi juga memastikan masyarakat bisa merasakan manfaatnya lebih awal,” jelas Deswan.

Menurut (Metro, 2024) untuk memperkuat komitmen digitalisasi transaksi guna mewujudkan Metro menjadi cashless society, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro Bangkit Haryo Utomo turut aktif dalam Forum Group Discussion (FGD) dan tim peningkatan kapasitas untuk mempercepat dan memperluas kegiatan daerah. Digitalisasi (TP2DD) dilaksanakan di Hotel Aidia Grande pada Selasa (27/02/2024) dihadiri oleh BPPRD dan pimpinan Bapenda daerah/kota se-Provinsi Lampung.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Melly Pitria Indriani dkk (2023) yang membahas pendapatan asli daerah dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten brebes (studi empiris pada pemerintah kabupaten periode 2018-2022). Riset ini menemukan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten brebes 2018-2022.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan akurat mengenai kondisi atau gejala yang dialami. Secara umum teknik pengumpulan data ada 3 jenis, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data

yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data. instrumen utama pengumpulan data adalah orang. Penelitian ini merupakan penelitian analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah, kekayaan daerah dan belanja modal mampu meningkatkan kemandirian keuangan dikota metro. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti merupakan instrumen utama penelitian ini dibantu dengan data laporan keuangan pemerintah daerah kota metro tahun 2020-2023. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Metro.

Tabel 1. Realisasi pendapatan asli daerah

| Tahun | Target PAD | Realisasi PAD |
|-------|--------------------|--------------------|
| 2020 | 196.214.243.748,12 | 216.097.157.233,90 |
| 2021 | 220.571.406.784,15 | 266.504.799.617,90 |
| 2022 | 232.062.337.471,00 | 233.104.070.173,39 |
| 2023 | 285.039.798.994,76 | 277.421.499.023,57 |

(Data diolah dari laporan keuangan BPPRD Kota Metro)

Berdasarkan keterangan Ibu Elsavivia Rusdi, S.IP., M.Eng. Selaku kepala bidang pembukuan dan pengendalian BPPRD Kota Metro, beliau menjelaskan bahwa pemerintah kota metro sudah mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui beberapa cara yaitu Untuk mengelola pajak daerah secara optimal, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai upaya, mulai dari pendataan, penagihan, hingga pemantauan. Pada tahap pengumpulan data, otoritas regional dapat mengembangkan sampel regional yang layak. Hal ini mencakup pengumpulan data komprehensif mengenai seluruh potensi panen di wilayah tersebut. Pemerintah daerah harus hati-hati mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber penerimaan pajak yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat memiliki gambaran yang jelas tentang potensi pajaknya.

Pada tahap penagihan, masyarakat dapat mengoptimalkan pengumpulan debit langsung. Upaya ini dapat dicapai dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit yang terafiliasi

dalam pengambilan sampel. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembayaran pajak dan pelaporan pajak bagi wajib pajak. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayarannya.

Dalam tahap pemantauan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui upaya yang ditingkatkan dan diperluas. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian intern dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penatausahaan pajak daerah. Pada saat yang sama, perluasan dapat dilakukan dengan memperluas cakupan wajib retribusi dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui advokasi dan pendidikan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan perpajakan daerah antara lain belum optimalnya infrastruktur pelayanan, masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah, dan belum optimalnya pemanfaatan pelayanan oleh masyarakat.

Pertama, hal ini terkait dengan kondisi infrastruktur layanan yang kurang optimal. Masih terdapat kekurangan atau kerusakan pada sarana dan prasarana pendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat aksesibilitas dan kualitas layanan yang diberikan. Memelihara dan meningkatkan infrastruktur pelayanan merupakan tantangan bagi pemerintah daerah.

Kedua, permasalahannya adalah tingkat kepatuhan daerah terhadap wajib pajak masih belum optimal. Masih terdapat penerimaan wajib yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai peraturan. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah. Selain itu, penegakan hukum dan sanksi yang tidak efektif juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan.

Ketiga, pemanfaatan layanan oleh masyarakat masih belum optimal. Masyarakat belum memanfaatkan secara maksimal pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan promosi layanan publik yang tersedia di wilayah tersebut, serta terbatasnya akses dan kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan cakupan wilayah.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi sebagai berikut :Meningkatkan kualitas infrastruktur layanan, mulailah dengan melakukan penilaian komprehensif terhadap kondisi infrastruktur Anda saat ini. seperti jalan, jaringan penyediaan air, listrik, telekomunikasi dan fasilitas umum lainnya. Berdasarkan hasil penilaian, disusun rencana strategis untuk memelihara, memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur prioritas. Selanjutnya, anggaran tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk pelaksanaan proyek infrastruktur. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat dan pemangku kepentingan dilibatkan. Selanjutnya,

menerapkan standar kualitas tinggi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dan memastikan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan efisiensi dan efektivitas investasi infrastruktur.

Meningkatkan pengelolaan perpajakan, mulailah dengan meninjau dan menyempurnakan peraturan dan prosedur perpajakan yang ada. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sampel, memperkuat sistem wajib pengumpulan dan pencatatan data sampel, dan mengoptimalkan mekanisme pengambilan sampel, termasuk penggunaan nomor teknologi. Menyederhanakan dan memperjelas struktur retribusi, mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan sistem keuangan daerah, serta menerapkan insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Menyosialisasikan layanan, mengembangkan strategi komunikasi dan kesadaran yang komprehensif menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi, seperti media massa, media sosial, papan buletin, dan aktivitas tatap muka. Memberikan informasi yang jelas, akurat dan dapat diakses tentang layanan yang tersedia. Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam proses sosialisasi. Melakukan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan strategi dan metode penyadaran serta memastikan adanya mekanisme umpan balik dan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan target asli pendapatan daerah (PAD) Kota Metro mengalami fluktuasi pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020, capaian PAD tercatat sebesar Rp25.445.524.946,93, artinya mengalami peningkatan. dari target PAD yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan efisiensi yang baik dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber daya PAD pada tahun tersebut.

Pada tahun 2021, realisasi PAD kembali mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai Rp53.273.641.361,70. Peningkatan ini menunjukkan semakin efektifnya upaya yang dilakukan untuk menggali potensi PAD di Kota Metro. Selain itu, pada tahun 2022 tingkat realisasi PAD juga mengalami peningkatan meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp7.775.547.154,50. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk lebih meningkatkan PAD masih dapat dilakukan. Namun pada tahun 2023, tingkat realisasi PAD justru mengalami penurunan sebesar -954.485.708,81. Penurunan ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk menganalisis lebih lanjut faktor penyebabnya, apakah karena situasi perekonomian yang kurang mendukung atau karena adanya hambatan lain dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber daya PAD.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan target penerimaan PAD Kota Metro pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi, dengan tiga tahun mengalami kenaikan (2020, 2021,

2022) dan satu tahun mengalami penurunan (2023). Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus mengkaji dan mengevaluasi upaya strategis peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Kekayaan Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Metro

Tabel 2. Kekayaan Daerah

| Tahun | Realisasi Kekayaan |
|-------|--------------------|
| 2020 | 182.982.724.871,48 |
| 2021 | 231.445.432.703,37 |
| 2022 | 193.440.793.020,85 |
| 2023 | 233.574.454.949,68 |

(Data diolah dari Laporan Keuangan BPPRD Kota Metro)

Hasil perhitungan pada tabel 2 bahwa kekayaan daerah pada tahun 2020 hingga tahun 2023 tidak mengalami fluktuasi namun secara umum cenderung meningkat. Pada tahun 2020, capaian kekayaan daerah tercatat sebesar Rp182.982.724.871,48. Kemudian pada tahun 2021, aset daerah tersebut meningkat cukup signifikan menjadi Rp231.445.724.871,48. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kekayaan di daerah pada periode ini. Namun pada tahun 2022, kekayaan daerah kembali turun hingga senilai Rp 193.440.793.020,85. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti berkurangnya pendapatan daerah atau meningkatnya biaya operasional. Meski mengalami penurunan pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 aset daerah meningkat signifikan dengan nilai Rp 233.574.454.949,68. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dilakukan untuk memulihkan dan meningkatkan kekayaan di wilayah tersebut selama periode ini. Secara keseluruhan, meskipun akan terjadi fluktuasi antara tahun 2020 dan 2023, tingkat kekayaan di wilayah ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan pengelolaan aset daerah pada periode ini cukup baik dengan upaya peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya operasional.

Kekayaan daerah berperan penting dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan data yang ada, terlihat kekayaan daerah pada tahun 2020 hingga tahun 2023 secara umum mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2020, capaian kekayaan daerah tercatat sebesar Rp182.982.724.871,48. Kemudian pada tahun 2021, aset daerah tersebut meningkat cukup signifikan menjadi Rp231.445.724.871,48. Meski pada tahun 2022 turun menjadi Rp193.440.793.020,85, namun pada tahun 2023 aset daerah kembali meningkat cukup signifikan hingga mencapai Rp233.574.454.949,68.

Peningkatan kekayaan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan sumber pendapatan di daerah. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap kemandirian keuangan suatu daerah, karena semakin besar kekayaan suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuannya untuk membiayai kebutuhan dan

pembangunannya tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah atau kiriman uang dari pusat. Oleh karena itu, peningkatan kekayaan daerah dapat menjadi indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini akan berdampak pada penguatan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Belanja Modal Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Metro

Tabel 3. Belanja Modal

| Tahun | Belanja Modal |
|-------|--------------------|
| 2020 | 166.890.856.331,76 |
| 2021 | 128.278.336.774,79 |
| 2022 | 92.402.548.843,27 |
| 2023 | 104.766.933.126,00 |

(Data diolah dari BPKAD Kota Metro)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3 bahwa belanja modal pada periode 2020 – 2023 tidak berfluktuasi melainkan cenderung berfluktuasi naik turun. Pada tahun 2020, realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp166.890.856.331,76. Kemudian pada tahun 2021 belanja modal meningkat signifikan menjadi Rp128.278.336.774,79. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode ini telah dilakukan upaya untuk meningkatkan belanja modal, yang dapat berupa peningkatan investasi pembangunan infrastruktur, pembelian aset tetap atau belanja modal lainnya.

Namun pada tahun 2022 belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp92.402.548.843,27. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemotongan anggaran belanja modal atau realokasi anggaran untuk keperluan lain. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022, belanja modal meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp104.766.933.126,00. Hal ini menunjukkan adanya upaya perubahan haluan dan peningkatan belanja modal selama periode ini. Secara keseluruhan, meskipun akan ada fluktuasi antara tahun 2020 dan 2023, belanja modal kemungkinan akan meningkat selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bertekad untuk terus meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur dan perolehan aset tetap yang merupakan indikator penting penguatan kapasitas keuangan dan kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan data yang tersaji, terlihat nilai belanja modal mengalami fluktuasi pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020, belanja modal tercatat sebesar Rp166.890.856.331,76. Kemudian pada tahun 2021 belanja modal meningkat signifikan menjadi Rp128.278.336.774,79. Namun pada tahun 2022 turun lagi menjadi Rp92.402.548.843,27. Selanjutnya pada tahun 2023 belanja modal kembali meningkat menjadi Rp104.766.933.126,00.

Fluktuasi belanja modal yang diakibatkannya dapat berdampak pada upaya meningkatkan kemandirian finansial di wilayah tersebut. Peningkatan belanja investasi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa prioritas investasi pemerintah daerah adalah pembangunan infrastruktur, perolehan aset tetap, dan lain-lain. Hal ini dapat berdampak positif pada penguatan kapasitas keuangan dan kemandirian keuangan di wilayah tersebut. Namun, pengurangan belanja modal pada tahun 2022 dapat mengindikasikan adanya realokasi anggaran untuk tujuan lain atau pengurangan prioritas investasi pembangunan. Situasi ini dapat berdampak negatif terhadap upaya peningkatan kemandirian keuangan di daerah.

Peningkatan belanja modal pada tahun 2023 menandakan upaya pemulihan dan peningkatan investasi di kawasan, yang dapat memperkuat kapasitas keuangan dan kemandirian finansial di kawasan. Stabilitas dan pertumbuhan belanja modal tahunan yang berkelanjutan dapat menjadi indikator utama peningkatan kemandirian finansial di kawasan ini. Secara keseluruhan, fluktuasi belanja modal kemungkinan besar akan berdampak pada upaya meningkatkan kemandirian finansial di kawasan, sementara stabilitas dan pertumbuhan belanja modal yang berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam mencapai kemandirian finansial yang optimal.

Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Metro

Berdasarkan keterangan Ibu Elsavivia Rusdi, S.IP., M.Eng. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah kota metro dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut.

Tetapkan prioritas belanja, saat menetapkan prioritas pembelian, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan dan skala prioritas. Hal ini melibatkan identifikasi layanan dasar, infrastruktur penting dan program yang mempunyai dampak signifikan terhadap masyarakat. Kemudian, alokasi anggaran perlu diseimbangkan, yaitu menyeimbangkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Hal ini penting untuk memastikan alokasi anggaran konsisten dengan tujuan pembangunan. Penting juga untuk mendorong efisiensi belanja dengan mengevaluasi dan meninjau belanja yang kurang diprioritaskan atau tidak efektif. Hal ini memungkinkan adanya realokasi anggaran ke elemen-elemen dengan prioritas lebih tinggi. Terakhir, integrasi rencana belanja dengan perencanaan strategis daerah juga harus dilakukan agar alokasi anggaran benar-benar mendukung tujuan pembangunan dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak jangka panjang.

Menyusun target pendapatan berdasarkan potensi, dalam menyusun target pendapatan berbasis potensi, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber pendapatan di daerah, baik dari pajak daerah, pajak daerah, dan pendapatan lainnya. Setelah

itu, perlu dilakukan analisis potensi dan prospek masing-masing sumber pendapatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan dunia usaha, dan daya beli masyarakat. Berdasarkan analisis ini, target pendapatan yang realistis dan dapat dicapai dapat ditetapkan, dengan mempertimbangkan upaya optimalisasi pemungutan, perbaikan sistem administrasi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan. Selain itu, rencana aksi dan strategi harus disiapkan untuk meningkatkan pendapatan seperti pengembangan database, penggunaan teknologi informasi dan penyederhanaan prosedur. Terakhir, penting juga untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian pendapatan secara berkala, serta menyesuaikan sasaran jika diperlukan.

Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2020-2023 masih tergolong rendah, terbukti pada tahun 2020 rasio kemandirian keuangan berada pada 0,24% yang artinya tingkat kemandirian keuangan kota metro sangat rendah, pada tahun 2021 rasio kemandirian keuangan berada pada 0,29% yang artinya kemandirian keuangan kota metro berada pada tingkat rendah, dan pada tahun 2022 rasio kemandirian keuangan berada pada 0,26 yang termasuk kategori rendah, lalu pada tahun 2023 rasio kemandirian berada pada tingkat 0,29% yang masih termasuk kategori rendah.

Tingkat kemandirian ekonomi daerah Kota Metro pada tahun 2020 sebesar 0,24%. Rasio sebesar 0,24 persen ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian finansial Kota Metro pada tahun 2020 masih sangat rendah. Artinya, Kota Metro masih sangat bergantung pada sumber pendanaan pemerintah pusat atau provinsi, dibandingkan Pendapatan Primer Daerah (PAD) sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kota Metro dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik masih sangat terbatas.

Pada tahun 2021, kemandirian ekonomi daerah Kota Metro meningkat menjadi 0,29 persen. Meski ada pertumbuhan, namun rasio ini masih rendah sebesar 0,29%. Artinya kemandirian keuangan Kota Metro masih rendah, namun ketergantungan terhadap sumber keuangan eksternal (pusat/provinsi) masih cukup tinggi. Masih diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan transfer. Pada tahun 2022 Kota Metro mencatatkan tingkat kemandirian ekonomi daerah sebesar 0,26%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kemandirian perekonomian Kota Metro masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan Kota Metro dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik dari sumber keuangan sendiri (PAD) masih terbatas.

Pada tahun 2023 Kota Metro mempunyai tingkat kemandirian ekonomi daerah sebesar 0,29%. Meski mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, namun rasio sebesar 0,29% ini

masih tergolong dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan Kota Metro masih belum mampu meningkatkan kemandirian keuangannya secara signifikan sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat/provinsi masih cukup tinggi. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pada periode tahun 2020-2023, kemandirian perekonomian daerah Kota Metro masih tergolong rendah, dan derajat kemandiriannya berkisar antara 0,24% hingga 0,29%. Kondisi ini menunjukkan Kota Metro belum optimal menggali potensi Pendapatan Awal Daerah (PAD) sehingga masih sangat bergantung pada sumber pendanaan non daerah. Upaya peningkatan kemandirian perekonomian daerah harus terus dilakukan agar Kota Metro dapat lebih mandiri membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah Kota Metro menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2020 hingga tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Penurunan PAD pada tahun 2023 menandakan pemerintah Kota Metro belum bisa memanfaatkan potensi daerah secara maksimal sehingga gagal mencapai tujuan pendapatan asli daerah. Kekayaan daerah meski mengalami pasang surut, namun kekayaan daerah Kota Metro secara umum belum optimal dari tahun ke tahun. Fluktuasi kekayaan daerah menunjukkan bahwa pemerintah Kota Metro gagal mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal dan berkelanjutan. Dan belanja modal meski mengalami pasang surut, namun total belanja modal Kota Metro cenderung meningkat pada tahun 2020 hingga 2023. Peningkatan investasi pada tahun 2021 dan 2023 menunjukkan upaya pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan daerah. Kemandirian keuangan daerah kota secara keseluruhan, tingkat kemandirian perekonomian daerah Kota Metro antara tahun 2020 hingga tahun 2023 tergolong rendah. Kota Metro masih sangat bergantung pada sumber pendanaan pemerintah pusat atau provinsi dibandingkan pendapatan utama daerah (PAD).

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro diharapkan lebih dimaksimalkan lagi kinerjanya dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah dan kekayaan daerah melalui upaya intensifikasi dan perluasan seperti pembayaran pajak tepat waktu. Serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro diharapkan juga agar terus meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat dengan baik, seperti membuat jalan mulus, irigasi dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani dan Santika. (2022). Pengaruh Electronic Word of Mouth (E-Wom) Terhadap Keputusan Pembelian. In *Journal Ekonomi Dan Manajemen*.
- Aziz, M. (2022a). *Jaringan dokumentasi dan informasi hukum*. <https://jdih-dprd.metrokota.go.id/berita/detail?p=dprd-kota-metro-setujui-pertanggungjawaban-apbd-tahun-2021-4134860>
- Aziz, M. (2022b). *Jaringan dokumentasi dan informasi hukum*. <https://jdih-dprd.metrokota.go.id/berita/detail?p=pendapatan-daerah-kota-metro-naik-9-milyar--9339913>
- Metro. (2024). *BPPRD Kota Metro*.
- Metro,D.(2023).*HeadlineLampung*. <https://headlinelampung.com/2023/11/22/pandangan-umum-fraksi-dprd-kota-metro-pendapatan-daerah-masih-bergantung-pada-pendapatan-transfer/>
- Mithasarinama ersy nadia, inapaty adha biana, N. (2023). Determinan tata kelola pemerintahan pada OPD kabupaten Bima. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 16(1), 19. <https://doi.org/10.24123/jati.v16i1.5227>
- Nadeak, T., & Sari, L. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021. *Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian (KNPP)*, 1, 374–418.
- Nurvaliza siti, P. hamdani gerry. (2024). Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera barat. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 4(1), 739–747.
- Nuzulia, A. (2021). Indikator belanja modal. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Pandawangi.S. (2021). Metodologi Penelitian. *Journal Information*, 4, 1–5.
- Post, L. (2021). *Badan pemeriksa keuangan republik indonesia*. <https://lampung.bpk.go.id/apbd-2020-metro-alami-defisit/>
- Ramadhan rizky muhammad. (2022). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam di provinsi aceh tahun 2016-2020* (Issue 8.5.2017). <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Richard oliver (dalam Zeithml., dkk 2018). (2021). Penelitian Deskriptif Kualitatif. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Rivandi muhammad dan Angraini yeyen. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 -2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(1), 12.
- Sanjaya, D., & Helmy, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal dengan Petumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi Se- Indonesia periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 450–469. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.369>
- Sugiyono. (2020). Pengaruh Fasilitas Ruang Tunggu Terhadap Kenyamanan Penumpang di Bandar

Udara Internasional Banyuwangi. *Jurnal Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.*, 6–22.

Sugiyono 2019. (2018). Sugiyono- Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Sutopo (Ed.); edisi kedua). Alfabeta. *Metode Penelitian*, 32–41.

Suparyanto dan Rosad. (2020). Teknik analisis data. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*

Vianney suyatno lazarus. (2024). *ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA.* 2(4), 1–9.